

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN
VALUE FOR MONEY PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TEKNOLOGI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama	:	Ayu Fitria
NPM	:	1705170262
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : AYU FITRIA
NPM : 1705170262
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TEKNOLOGI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Pengaji

Pengaji I

Pengaji II

PANDAPOTAN RHTONGA, SE., M.Si)

(YUSNENI AFRITA NASUTION, SE., M.Si)

Pembimbing

(UMI KALSUM, SE., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AYU FITRIA

N.P.M : 1705170262

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TEKNOLOGI PROVINSI SUMATERA
UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(UMI KALSUM, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Fitria
NPM : 1705170262
Dosen Pembimbing : Umi Kalsum, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Tambahkan hasil penelitian.	19/07/2022	✓
Bab 2	- Perbaikan kohesi perbaiki.	19/07/2022	✓
Bab 3	- perbaiki tabel.	19/07/2022	✓
Bab 4	-		✓
Bab 5	-		✓
Daftar Pustaka	- lampiran dilengkapi	19/07/2022	✓
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Sidang.	25/07/2022	✓

Medan, Juli 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Umi Kalsum, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Fitria
NPM : 1705170262
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TEKNOLOGI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Ayu Fitria

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2021 dengan menggunakan prinsip value for money yang terdiri atas rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan data kuantitatif yang berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari rasio ekonomis sudah ekonomis karena realisasi belanja masih dibawah anggaran belanja, namun terjadi penurunan atas kinerjanya. Ditinjau dari rasio efisiensi selalu mengalami penurunan karena setiap tahunnya mengalami kerugian atau defisit. Dan ditinjau dari rasio efektivitas tergolong efektif karena mampu melebihi dan mendekati target pendapatan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pengukuran Kinerja, Laporan Realisasi Anggaran, Value for Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan *Value for Money* pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara”** yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE.,MM.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si, selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si. Ak., selaku sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 7. Ibu Umi Kalsum, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 8. Bapak Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 9. Buat seluruh Keluarga dan teman yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Aamin.

Medan, Maret 2022

Penulis

Ayu Fitria

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Akuntansi Sektor Publik	9
2. Value for Money.....	13
3. Penganggaran Sektor Publik	16
4. Pengukuran Kinerja Sektor Publik	24
5. Kinerja Keuangan	27
B. Kerangka Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Definisi Operasional Variabel.....	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	38

BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Data.....	39
B. Analisis Data.....	42
C. Pembahasan.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021	5
Tabel 2.1	Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan	14
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	15
Tabel 2.3	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	16
Tabel 3.1	Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan	34
Tabel 3.2	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	35
Tabel 3.3	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	36
Tabel 3.4	Waktu Penelitian	36
Tabel 4.1	Rasio Ekonomis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara	42
Tabel 4.2	Rasio Efisiensi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara	44
Tabel 4.3	Rasio Efektivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual..... 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik di Indonesia telah berkembang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Hak otonomi daerah memberikan kebebasan setiap organisasi sektor publik di masing-masing daerah untuk mengolah dan meningkatkan kinerjanya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Namun pada kenyataannya, organisasi sektor publik sering menjadi tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Dalam setiap organisasi hal utama yang harus diperhatikan ialah kinerja. Setiap organisasi mempunyai kriteria dalam mengukur kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat berupa apa saja tujuan atau target yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau targetnya apakah sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Pengukuran kinerja harus berdasarkan karakteristik operasional organisasi untuk mendefinisikan indikator dan pengukuran yang digunakan.

Tugas utama pemerintah selaku organisasi sektor publik adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kinerja instansi pemerintah saat ini

menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban para penyelenggara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat.

Kinerja organisasi menurut Surjadi (2009:7) adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja organisasi sektor publik adalah hasil kerja yang dicapai oleh sekelompok orang di dalam suatu organisasi publik dengan wewenang dan tanggungjawab yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. Sehingga dengan adanya kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepada aparatur organisasi sektor publik diharapkan mampu memberikan pelayanan prima yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan (finansial) dan non-keuangan (nonfinasial). Sistem pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai alat pengendalian suatu organisasi dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Menurut penulis, kinerja organisasi adalah suatu hasil kerja dalam pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi. Maka kinerja organisasi sektor publik adalah hasil kerja yang dicapai oleh sekelompok orang suatu organisasi publik dalam menjalankan tugasnya.

Pengukuran kinerja dalam instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memulihkan kinerja dengan membandingkan sistem dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat dilakukan dengan konsep *value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2009: 04), *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pada konsep *value for money* juga mengukur apakah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik telah memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat dalam *value for money* ialah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan

sumber daya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan, dan efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam organisasi sektor publik, kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Sejak diterapkannya anggaran berbasis kinerja setiap organisasi sektor publik terutama pemerintahan dituntut agar mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan (Sihombing, 2008). Jika dibandingkan dengan laporan neraca, laporan realisasi anggaran menduduki sebagai prioritas yang lebih penting.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat kita lihat dari Laporan Realisasi Anggaran, menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, Pertama

untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimasudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004: 121). Oleh karena itu, laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan instansi atau daerah yang dinilai paling utama. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Provsu) merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di provinsi Sumatera Utara. Disnaker Provsu mempunyai tugas melaksanakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

Tabel 1.1

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2021
(dalam Rupiah)**

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2019	2.362.458.000	1.777.481.300	54.462.365.423	49.453.131.346
2020	1.505.000.000	2.066.757.700	44.100.158.875	41.893.912.917
2021	1.910.000.000	1.769.698.740	50.200.740.052	47.022.066.385

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa kinerja Disnaker Provsu pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 2.362.458.000 dan tahun 2021 dengan anggaran

sebesar Rp 1.910.000.000 tidak mampu mengumpulkan pendapatan sesuai anggaran. Namun pada tahun 2020 dengan anggaran Rp 1.505.000.000 mampu melampaui anggaran pendapatan yang ditetapkan. Sedangkan dilihat dari aspek belanja Disnaker Provsu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 54.462.365.423, Rp 44.100.158.875 dan Rp 50.200.740.052 mampu melakukan kegiatan belanja tanpa melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dilihat secara umum bahwa kinerja Disnaker Provsu dapat dikatakan baik karena sudah ekonomis dan efektif meskipun belum efisien dalam pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisis laporan realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan tiga analisis yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, serta rasio efektivitas. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan *Value for Money* pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dan 2021.
2. Anggaran belanja yang telah ditetapkan belum terealisasikan secara optimal.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021 pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintah, terutama untuk mengukur kinerja keuangan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2019-2021 jika ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2019-2021 jika ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya antara lain adalah:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

2. Bagi Institusi

Melalui penelitian ini dapat memberikan masukan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara tentang penilaian kinerja dengan konsep *value for money* sebagai evaluasi atas kinerja yang sudah dicapai demi peningkatan pelayanan di periode berikutnya.

3. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi tambahan mengenai organisasi sektor publik bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi memiliki banyak definisi. Akuntansi merupakan suatu jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi-transaksi ekonomi yang menghasilkan suatu informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu. Sektor publik merupakan semua yang berhubungan dengan kepentingan publik serta penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik.

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi-transaksi ekonomi yang menghasilkan suatu informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Menurut Dwi Ratmono (2015), akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik (Mardiasmo, 2009). *American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik berkaitan dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Untuk mencapai tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik, maka perlu dilakukan peningkatan terhadap efektivitas penerapan akuntansi, khususnya pada akuntansi sektor publik.

Pada umumnya organisasi sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya untuk kepentingan publik maka organisasi sektor publik biasanya tidak berorientasi pada laba (*profit*) sebagai tujuan akhirnya. Organisasi sektor publik memiliki tujuan, karakteristik, struktur dan proses, serta lingkungan operasional yang berbeda dengan sektor privat atau sektor swasta.

Organisasi sektor publik sebagian besar adalah merupakan suatu organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapula yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk mulai dari organisasi yang menyelenggarakan pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang sosial sampai dengan organisasi yang bidangnya sangat khusus seperti

beasiswa. Dengan kata lain organisasi sektor publik adalah *government* (pemerintah) yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, dimana pemerintah diberi kekuasaan oleh masyarakat untuk mengatur dan menjamin pemenuhan kebutuhan barang dan jasa publik yang berdasarkan hukum.

Untuk melakukan pengelolaan organisasi sektor publik agar dapat meningkatkan layanan publik dan penghematan biaya yang akan dikeluarkan untuk pelayanan publik, maka perlu adanya *value for money* dalam menjalankan kegiatannya, dimana *value for money* mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

b. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari lima puluh tahun ini. Oleh karena itu, penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik berhubungan erat dengan akuntansi sektor publik.

Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang memiliki ruang lingkup meliputi semua lembaga pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), organisasi nonlaba dan departemen-departemen dibawahnya, seperti yayasan, organisasi politik, perguruan tinggi, kesehatan, sekolah, organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi nonlaba lainnya.

c. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas yang memiliki target atau tujuan untuk mencapai hasil tertentu dimana hasil tersebut harus memiliki manfaat bagi publik.

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhi. Akuntansi sektor publik biasanya digunakan oleh organisasi pemerintah daerah maupun pusat. Peran akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (Glynn, 2013) membagi tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara tepat, efisiensi, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi instansi untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab agar dapat mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

2. *Value For Money*

a. Pengertian *Value for Money*

Perluasan Konsep pada sektor publik yang memiliki konsep 3E (economy, efficiency, effectiveness) diperluas dengan menambahkan equity (keadilan) dimana semua masyarakat mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh pelayanan, tanpa adanya diskriminasi. Prinsip keadilan berkaitan dengan kesetaraan (equality), yaitu prinsip di mana pemerintah menerapkan pemerataan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan (Pandapotan, 2021:32).

Value for Money merupakan suatu indikator kinerja organisasi sektor publik untuk menilai suatu kinerja pada perusahaan publik yang juga digunakan untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas segala kegiatan pada organisasi sektor publik tersebut.

Value for money merupakan suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Konsep *value for money* sering disebut sebagai inti pengukuran kinerja sektor publik karena merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik.

Menurut Mahmudi (2007) dalam Halim dan Kusufi (2013:132) *Value for money* juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya.

Konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan *Value for money* mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu:

- 1) Ekonomis yaitu perolehan sumber daya dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara sumber daya dengan biaya sumber daya yang dinyatakan dalam satuan moneter. Hal ini terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir atau menghemat penggunaan sumber daya dengan menghindari pengeluaran yang boros. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis apabila bisa menghilangkan atau mengurangi pengeluaran biaya yang tidak perlu. Penggunaan sumber daya dibawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sebaliknya penggunaan sumber daya yang melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan.

$$Rasio Ekonomi = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Ekonomis

Percentase Kinerja	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% – 80%	Kurang Ekonomis
Kurang Dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

- 2) Efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi ini dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sesuatu yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Proses kegiatan operasional bisa dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

$$Rasio Efisiensi = \frac{Realisasi Belanja}{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi

Percentase Kinerja	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% – 80%	Efisien
Kurang Dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

- 3) Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target suatu organisasi. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan atau sasaran akhir kebijakan.

$$Rasio Efektivitas = \frac{Realisasi Pendapatan}{Anggaran Pendapatan} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

b. Manfaat *Value for Money*

Value for Money memiliki manfaat yang penting bagi pengukuran kinerja suatu organisasi sektor publik. *Value for Money* dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai dengan tujuan atau target yang ingin dicapai. Hingga tercipta mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang efisien, ekonomis dan efektif.

3. Penganggaran Sektor Publik

a. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif selama periode waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dapat dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar, anggaran adalah alat manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga untuk menggunakannya sebagai bahan taksiran diperlukan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali. Hal ini dikarenakan data dan informasi tersebut akan mempengaruhi keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran.

Sedangkan dari pandangan sektor publik, menurut Harun (2008: 100) anggaran merupakan pernyataan kuantitatif dari perencanaan badan pemerintah yang dinyatakan baik dalam bentuk fisik maupun keuangan atau keduanya.

Proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut penganggaran. Penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan penganggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengorganisasian kerja, dan alat pengawasan kerja.

Pada sektor publik, anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas publik di dalam mengelola dana publik dan program-program yang didanai dengan uang publik sehingga anggaran pada sektor publik justru harus diinformasikan untuk didiskusikan secara terbuka.

b. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran berada dalam ruang lingkup akuntansi manajemen, yang mana memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran dari Aspek Mikro

Peran anggaran dari aspek mikro mengacu pada fungsi penganggaran dalam sistem perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi.

Berikut ini fungsi anggaran dari aspek mikro, yaitu:

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, jumlah biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

- b. Anggaran sebagai alat pengendalian, digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending), pengeluaran terlalu rendah (underspending), salah sasaran (miss appropriation) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending).
- c. Anggaran sebagai alat politik, pada organisasi sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitemen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk menetapkan prioritas dan kebutuhan keuangan untuk prioritas tertentu.
- d. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilaksanakan oleh bagian/unit kerja lainnya melalui dokumen anggaran yang komprehensif.
- e. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah mencapai tujuan, baik dalam hal terlaksananya suatu kegiatan maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
- f. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- g. Anggaran sebagai alat motivasi, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan karyawannya untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan sasaran yang ditetapkan organisasi.

h. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik, keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan rakyat di lembaga legislatif.

2. Fungsi Anggaran dari Aspek Makro

Anggaran sektor publik dapat berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yaitu melakukan alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Fungsi anggaran dari aspek makro antara lain:

- a. Anggaran sebagai alat alokasi, anggaran sektor publik berfungsi sebagai suatu alat alokasi yaitu untuk mengalokasikan anggaran kedalam urusan, fungsi, organisasi, dan program kerja.
- b. Anggaran sebagai alat distribusi, anggaran berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan atau sumber daya publik agar terjadi pemerataan keadilan ekonomi, melalui anggaran sektor publik ketimpangan ekonomi antar daerah dan antar masyarakat miskin dengan yang kaya dapat dikurangi.
- c. Anggaran sebagai alat stabilisasi, anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat stabilisasi yaitu untuk menciptakan stabilisasi ekonomi, sosial, dan politik.

c. Tujuan Anggaran Sektor Publik

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan

pemerintah untuk melayani dan menyejahteraan rakyat. Beberapa karakteristik tujuan pokok dari adanya anggaran sektor publik, yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
3. Anggaran berisi komitmen atau kemampuan manajemen untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.
4. Anggaran yang diusulkan ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat dalam kondisi tertentu.

d. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Adapun jenis-jenis anggaran sektor publik secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan.

2. Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik.

3. Anggaran Pengesahan

Anggaran ini dibagi kedalam anggaran tentatif (tentative) dan anggaran enacted. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislaltif karena kemunculannya dipicu oleh hal-hal tidak direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, anggaran enacted adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

4. Anggaran Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah jumlah dana yang dialokasikan setiap tahun kepada setiap Daerah Otonom (provinsi, kabupaten, kota) di Indonesia sebagai dana pembangunan.

5. Anggaran Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

e. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Proses penyusunan anggaran sektor publik mengomunikasikan tujuan organisasi kepada para pengelola organisasi, pengalokasian sumber daya, penyediaan umpan balik, dan motivasi pegawai. Proses penganggaran harus distandardkan dengan menggunakan anggaran manual, format anggaran, dan prosedur formal. Proses penyusunan anggaran juga harus menyesuaikan pada kebutuhan, konsistensi dengan struktur organisasi, dan mempertimbangkan sumber daya manusia. Proses penganggaran menetapkan tujuan dan kebijakan, merumuskan pembatas, menyebutkan satu persatu sumber daya yang

dibutuhkan, menguji kebutuhan spesifik, menyediakan fleksibilitas, memasukkan asumsi, dan mempertimbangkan batasan. Proses penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik, yaitu:

1) Persiapan Anggaran (*Preparation*)

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian, setiap unit diarahkan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasi oleh bagian anggaran. Setelah diperiksa dan mendengar pendapat semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan.

2) Persetujuan Lembaga Legislatif (*Legislative Enactment*)

Setelah persiapan anggaran selesai disusun oleh eksekutif, tahap selanjutnya adalah pembahasan dan pengesahan oleh anggota dewan legislatif sebagai pelaksana hak anggaran. Pembahasan di dewan meliputi pembahasan di tingkat komisi atau badan anggaran dan pembahasan di tingkat sidang paripurna dewan. Anggaran akan diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan untuk memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat (*public hearing*) sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.

3) Administrasi (*Administration*)

Setelah anggaran disetujui atau disahkan, anggaran akan dilaksanakan, baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini,

dilakukan juga proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

4) Pelaporan (*Reporting*)

Realisasi atas pelaksanaan anggaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.

5) Pemeriksaan (*Pos-Audit*)

Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemerintah independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi suatu masukan atau umpan balik (feedback) untuk proses penyusunan anggaran pada periode berikutnya.

f. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi yang berdampingan tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

Manfaat laporan realisasi anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan

pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dan memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode yang akan datang dengan menyajikan laporan secara komparatif.

4. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

a. Pengertian Kinerja Sektor Publik

Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan (Indrayani & Khairunnisa, 2018). Menurut Pilat & Morasa (2017) “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.” Sedangkan menurut Ardila & Putri (2015) “Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak

diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.”

Dalam konteks individu, kinerja dapat berupa hasil yang telah dicapai atas apa yang telah dilakukan. Sedangkan dalam konteks organisasi, kinerja dapat berupa hasil pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Namun pada dasarnya kinerja tetaplah hal yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran. Jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka kinerjanya tidak baik. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka kinerjanya baik. Dan jika hasil yang dicapai melebihi tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka kinerjanya sangat baik.

Pengukuran kinerja berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis yang menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja diawali dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memantau kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai pertanggungjawaban organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Sistem *reward* dan *punishment* digunakan sebagai cara untuk memperkuat sistem

pengukuran kinerja. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi tersebut mampu melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan standar yang tinggi tetapi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi akan tercapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi tersebut dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Dengan demikian, melalui pengukuran kinerja organisasi inilah dasar pengambilan keputusan yang tepat dapat dikembangkan juga dipertanggungjawabkan oleh organisasi.

Bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi dan tujuan tidak ada artinya tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Pengukuran kinerja memungkinkan organisasi untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

b. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat pencapaian kinerja. Maka untuk bisa mencapai kinerja yang baik dibutuhkan tujuan yang jelas pula. Bila

pengukuran kinerja dilakukan secara terus menerus maka hal tersebut akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan yang terus menerus dilakukan akan mencapai keberhasilan yang perusahaan inginkan untuk kedepannya. Berikut berberapa tujuan pengukuran kinerja sektor publik yaitu:

- 1) Untuk menetapkan strategi dengan lebih baik.
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang.
- 3) Untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
- 4) Untuk menciptakan Akuntabilitas Publik.

Adapun manfaat pengukuran kinerja sektor publik ialah:

- 1) Memberi pemahaman tentang ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja.
- 2) Memberi arahan untuk mencapai tujuan atau target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Memastikan bahwa keputusan yang diambil dilakukan secara objektif.
- 4) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja.

5. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006:239).

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk diketahui karena pengukuran yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Karena alasan itu, pihak manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta tujuan pengukuran kinerja keuangan tersebut. Menurut Munawir (2012), tujuan dari melakukan kinerja keuangan adalah:

- 1) Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.

- 2) Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- 4) Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

c. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Penilaian kinerja keuangan sangat penting terutama bagi para investor karena akan digunakan sebagai suatu keputusan apakah perusahaan tempat

investor akan menanamkan modal dan mempertahankan investasinya atau akan berpindah investasi di tempat lain.

Bagi perusahaan, penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang, serta melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat menilai kontribusi suatu divisi/bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan, dapat menggunakan rasio atau indeks sebagai tolak ukur untuk menilai dan menghubungkan dua data keuangan pada laporan keuangan perusahaan.

Adapun beberapa perbandingan yang terdapat dalam jenis analisis rasio keuangan meliputi dua bentuk, yaitu pertama, perbandingan rasio antara satu perusahaan lain yang sejenis, dan kedua yaitu membandingkan rasio di masa lalu, saat ini, ataupun masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama.

B. Kerangka Konseptual

Organisasi sektor publik sering dianggap sebagai tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik agar menciptakan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan penampilan hasil kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas. Akuntabilitas dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok. *Value for money* merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.

Salah satu alat pengendalian yang mempunyai ukuran-ukuran akuntansi adalah anggaran. Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasi. Anggaran sering digunakan untuk menilai akuntabilitas para manajer. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi adalah semua hal yang dipengaruhi oleh kemampuan seorang manajer untuk mencapai atau melampaui tujuan yang direncanakan. Anggaran merupakan salah satu komponen penting untuk menterjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dan juga berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi dan karakteristik prestasi.

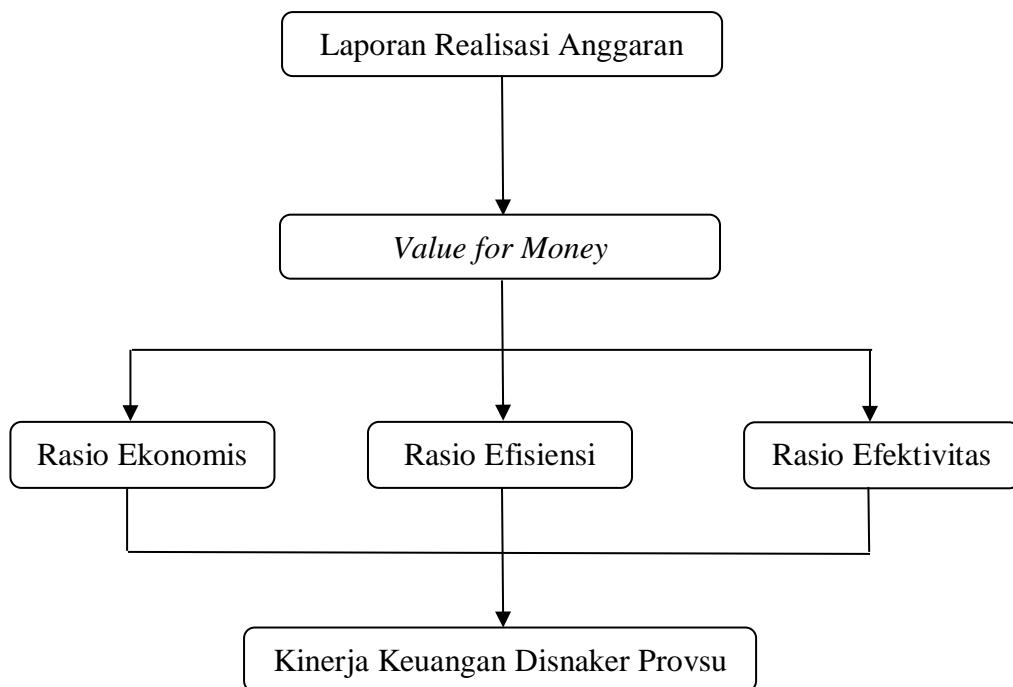
Hasil atas pelaksanaan anggaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan berbagai informasi terkait realisasi anggaran, pembiayaan, belanja dan lain sebagainya dan membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode.

Kinerja keuangan adalah evaluasi suatu perusahaan mengenai aset, kewajiban, ekuitas, biaya, pendapatan, dan profitabilitas secara keseluruhan. Secara internal, kinerja keuangan diperiksa untuk menentukan tolak ukur atau pencapaian perusahaan saat ini. Bagi eksternal, kinerja keuangan dianalisis untuk menentukan peluang investasi potensial dan menentukan apakah suatu perusahaan layak bagi pihak eksternal tersebut.

Value for money merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan

organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2013). Oleh karena itu, penulis akan mengukur rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas pada laporan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Provsu) tahun 2019-2021 untuk mengetahui kinerja keuangan Disnaker Provsu.

Dari penjelasan diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2015), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu hasil penelitian yang terkumpul sebagaimana adanya dan tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2013: 59), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, kegiatan atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan *Value for Money* pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara”. Maka definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Value for Money* merupakan suatu indikator kinerja organisasi sektor publik untuk menilai suatu kinerja pada perusahaan publik yang juga digunakan untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas segala kegiatan pada organisasi sektor publik tersebut.

2. Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis adalah suatu rasio pengukuran kinerja untuk mengukur tingkat ekonomis suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya. Ekonomis perolehan sumber daya dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara sumber daya dengan biaya sumber daya yang dinyatakan dalam satuan moneter. Hal ini terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif.

$$Rasio Ekonomi = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Ekonomis

Percentase Kinerja	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% – 80%	Kurang Ekonomis
Kurang Dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah suatu rasio pengukuran kinerja untuk mengukur seberapa efektifnya suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya. Pengukuran efisiensi ini dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sesuatu yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Proses kegiatan operasional

bisa dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

$$Rasio Efisiensi = \frac{Realisasi Belanja}{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Efisiensi

Percentase Kinerja	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% – 80%	Efisien
Kurang Dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

4. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas merupakan suatu rasio pengukuran kinerja untuk mengukur seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target suatu organisasi. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan atau sasaran akhir kebijakan.

$$Rasio Efektivitas = \frac{Realisasi Pendapatan}{Anggaran Pendapatan} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas

Percentase Kinerja	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Asrama No.143 Dwi Kora, Medan Helvetia, Kota Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan Juli 2022.

Tabel 3.4 **Waktu Penelitian**

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data konkret berupa angka-angka yang dianalisis dengan teknik statistik untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Dimana data penelitian ini berupa data yang diambil dan dihitung merupakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2019 sampai dengan 2021 pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh berupa dokumentasi yaitu jumlah hasil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mempelajari dokumen untuk memperoleh informasi ataupun data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2021.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengumpulkan data yang ada untuk selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan sehingga mendapatkan hasil berupa gambaran yang sebenarnya dari suatu masalah yang sedang diteliti. Data yang didapat akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus yang terdapat pada prinsip *value for money*, yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan:

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara. Data yang dikumpulkan berupa laporan realisasi anggaran Disnaker Provsu pada tahun 2019- 2021.

2. Melakukan analisis terhadap data

Pada tahap ini penulis akan membuat perhitungan *value for money* yaitu rasio ekonomis, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi dengan menggunakan rumus yang ada. Setelah itu, hasil setiap perhitungan akan ditampilkan dalam bentuk tabel.

3. Mendeskripsikan hasil perhitungan

Tahap ini menjelaskan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada setiap rasio yang ada dengan melihat berdasarkan kriteria masing-masing rasio.

4. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan

Tahapan terakhir yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Provsu) merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Tugas dari Disnaker Provsu yaitu melaksanakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Disnaker Provsu menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
3. Pengelolaan penempatan tenaga kerja dan pasar kerja.
4. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja serta lembaga latihan.
5. Pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi.
6. Pengelolaan pemagangan.
7. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
8. Pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja dan purna kerja, pengelolaan transmigrasi.
9. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten/kota.

10. Pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
11. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu:

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat.”

Dan untuk merealisasikan visi Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Provsu) diperlukan suatu perencanaan program atau kegiatan organisasi yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, Disnaker Provsu mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
2. Meningkatnya kesempatan kerja.
3. Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.
4. Terwujudnya pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan sehingga menjadi sentra produksi baru.

Dengan adanya visi, misi dan tujuan Disnaker Provsu menunjukkan bahwa Disnaker Provsu menjadi organisasi dengan sistem anggaran kinerja. Menurut Mardiasmo (2013), sistem anggaran kinerja merupakan sistem anggaran yang mencakup tujuan dan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Penganggaran merupakan suatu kegiatan mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja yang cenderung tidak terbatas. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus sebagai alat pengendalian. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *Value for Money* atau

pengawasan atas kinerja output. *Value for Money* merupakan inti dalam pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pengembangan indikator kinerja mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau sering disebut dengan 3E.

B. Analisis Data

1. Rasio Ekonomis

Untuk mengukur tingkat ekonomis Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{49.453.131.346}{54.462.365.423} \times 100\% \\ &= 90,80\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{41.893.912.917}{44.100.158.875} \times 100\% \\ &= 94,99\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{47.022.066.385}{50.200.740.052} \times 100\% \\ &= 93,66\% \end{aligned}$$

Tabel 4.1
Rasio Ekonomis
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis
2019	54.462.365.423	49.453.131.346	90,80%
2020	44.100.158.875	41.893.912.917	94,99%
2021	50.200.740.052	47.022.066.385	93,66%

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.1, maka untuk rasio ekonomis Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Provsu) pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan rasio ekonomis masing-masing sebesar 90,80%; 94,99% dan 93,66% termasuk dalam kategori ekonomis karena berada antara 90% sampai 100%.

Anggaran belanja tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 begitu juga realisasi belanja yang ikut mengalami kenaikan, hal ini dibuktikan dengan perhitungan rasio ekonomis bahwa tingkat ekonomis Disnaker Provsu mengalami penurunan. Akan tetapi, walaupun mengalami penurunan tingkat ekonomis Disnaker Provsu telah mampu melakukan penghematan belanja setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran bahwa setiap tahunnya anggaran belanja Disnaker Provsu yang telah ditetapkan tidak habis terpakai saat realisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Disnaker Provsu telah memenuhi syarat ekonomis.

Rasio ekonomis Disnaker Provsu untuk tahun 2019 sampai tahun 2021 terus mengalami fluktuatif. Dengan dilakukannya analisis rasio ekonomis dapat diketahui seberapa besar tingkat ekonomis dengan membandingkan realisasi belanja Disnaker Provsu terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Rasio Efisiensi

Untuk mengukur tingkat efisiensi Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{49.453.131.346}{1.777.481.300} \times 100\% \\ = 2.782,20\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{41.893.912.917}{2.066.757.700} \times 100\% \\ = 2.027,03\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{47.022.066.385}{1.769.698.740} \times 100\% \\ = 2.657,16\%$$

Tabel 4.2
Rasio Efisiensi
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi
2019	1.777.481.300	49.453.131.346	2.782,20%
2020	2.066.757.700	41.893.912.917	2.027,03%
2021	1.769.698.740	47.022.066.385	2.657,16%

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan data pada tabel 4.2, dapat dilihat rasio efisiensi Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berada dikategori tidak efisien karena hasil perhitungan menunjukkan angka diatas 100%.

Hal ini berarti Disnaker Provsu dinilai tidak efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan. Walaupun Disnaker Provsu mampu menghasilkan pendapatan melebihi anggaran yang ditetapkan dan mampu melakukan penghematan belanja. Keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila

ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

3. Rasio Efektivitas

Untuk mengukur tingkat efektivitas Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.777.481.300}{2.362.458.000} \times 100\% \\ = 75,23\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{2.066.757.700}{1.505.000.000} \times 100\% \\ = 137,32\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.769.698.740}{1.910.000.000} \times 100\% \\ = 92,65\%$$

Tabel 4.3
Rasio Efektivitas
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas
2019	2.362.458.000	1.777.481.300	75,23%
2020	1.505.000.000	2.066.757.700	137,32%
2021	1.910.000.000	1.769.698.740	92,65%

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat rasio efektivitas Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar

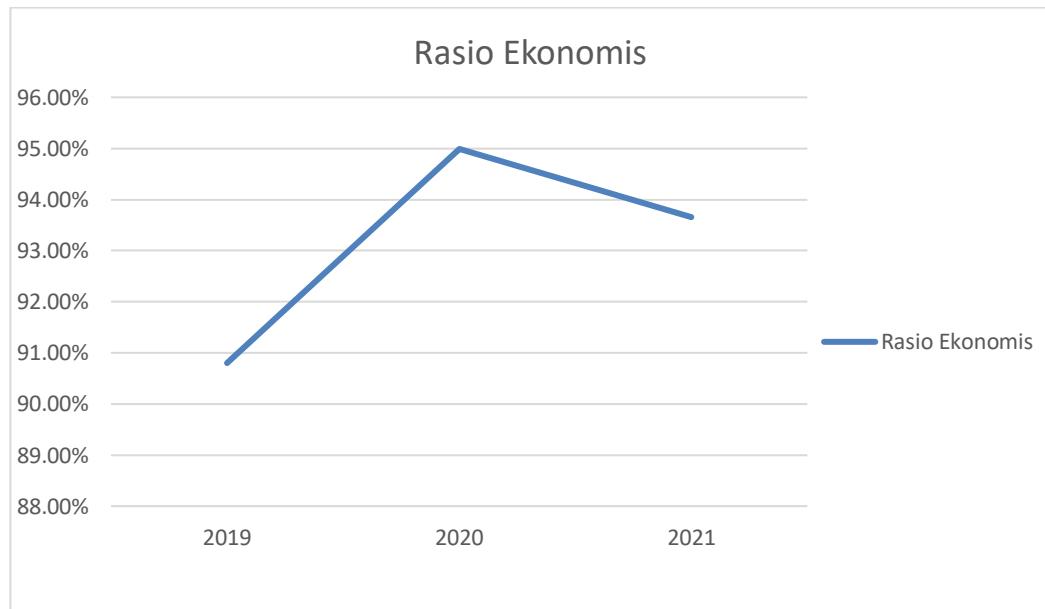
75,23% yang berarti dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai 80%. Sedangkan pada tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 137,32% yang berarti dalam kategori sangat efektif karena berada diatas 100%. Dan pada tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 92,65% sehingga termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90% sampai 100%.

C. Pembahasan

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Provsu) yang diukur dengan prinsip *value for money* mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

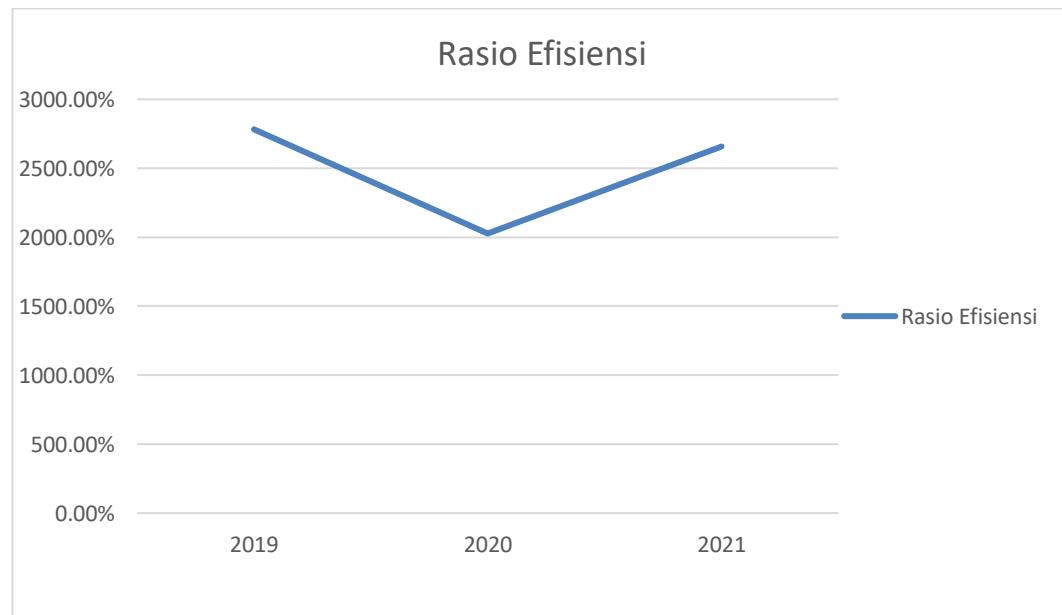
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka perubahan tingkat rasio ekonomis Disnaker Provsu dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Dapat dilihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa rasio ekonomis Disnaker Provsu pada tahun 2019 adalah sebesar 90,80% sehingga termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 90% sampai dengan 100%. Pada tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 94,99% sehingga termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 90% sampai dengan 100%, hal ini menunjukkan bahwa rasio ekonomis di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,19% dari tahun 2019. Dan pada tahun 2021 rasio ekonomis sebesar 93,66% sehingga termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 90% sampai dengan 100%, yang mana rasio ekonomis tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,33%. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa rasio ekonomis Disnaker Provsu pada tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi.

2. Rasio Efisiensi

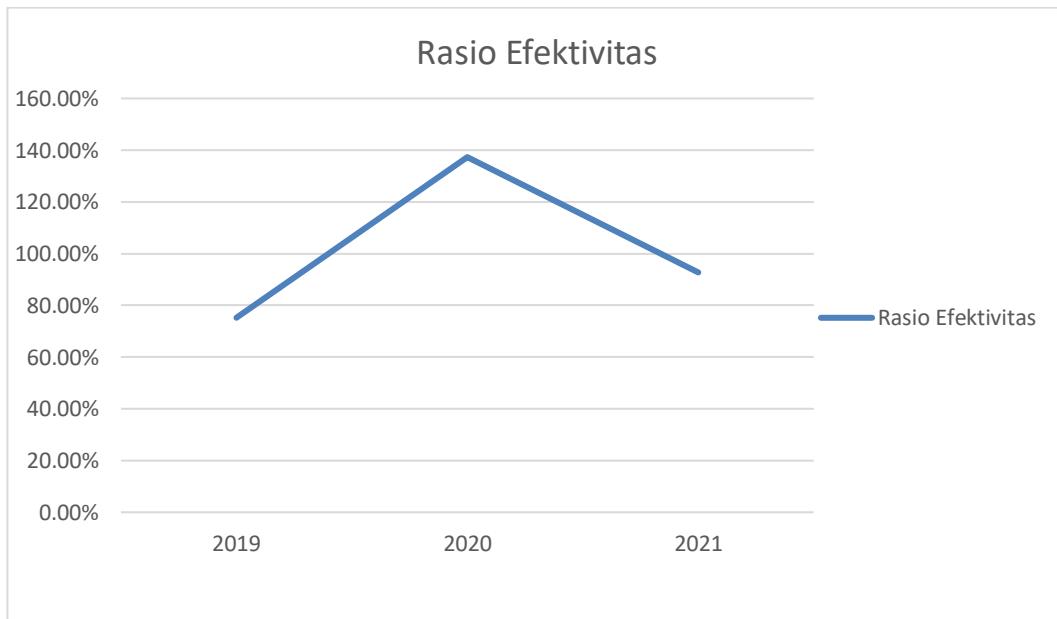
Hasil dari analisis data menunjukkan adanya perubahan tingkat rasio efisiensi Disnaker Provsu dari tahun 2019-2021 yang digambarkan sebagai berikut:



Untuk rasio efisiensi Disnaker Provsu tahun 2019 sebesar 2.782,20% sehingga berada dalam kategori tidak efisien karena rasio lebih dari 100%. Sedangkan pada tahun 2020 rasio efisiensi sebesar 2.027,03% sehingga berada dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, hal ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019 namun masih belum merubah kategori menjadi lebih baik. Dan tahun 2021 rasio ekonomis sebesar 2.657,16% sehingga berada dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, yang mana tingkat efisiensi mengalami penurunan dari tahun 2020.

3. Rasio Efektivitas

Hasil analisis data menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan tingkat rasio efektivitas Disnaker Provsu yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Rasio efektivitas Disnaker Provsu tahun 2019 adalah 75,23% sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai 80%. Sedangkan pada tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 137,32% sehingga berada

dalam kategori sangat efektif karena berada diatas 100%, ini menunjukkan rasio efektivitas pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 62,09%. Dan pada tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 92,65% sehingga termasuk dalam kategori efektif karena berada antara 90% sampai 100%, yang mana terjadinya penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2021 sebesar 44,67%.

4. Terjadinya penurunan kinerja Disnaker Provsu disebabkan karena menurunnya pendapatan yang diterima sedangkan belanja yang dikeluarkan mengalami kenaikan. Sehingga defisit Disnaker Provsu setiap tahunnya terus bertambah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2021 rasio ekenomis dan rasio efektivitas Disnaker Provsu mengalami fluktuasi yang masih tergolong normal, di sisi lain rasio efisiensi mengalami fluktuasi akan tetapi jauh dari kategori efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi dengan prinsip *value for money* dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari rasio ekonomis, Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 sudah ekonomis karena realisasi belanja masih dibawah anggaran belanja, namun terjadi penurunan atas kinerjanya.
- b. Ditinjau dari rasio efisiensi, Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 tidak efisien karena setiap tahunnya realisasi belanja lebih besar daripada realisasi pendapatan yang berarti mengalami kerugian atau defisit secara terus menerus.
- c. Ditinjau dari rasio efektivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 sudah efektif karena mampu melebihi dan mendekati target pendapatan yang telah ditetapkan. Semakin sedikit sisa anggaran maka kinerja instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran banyak maka kinerja suatu instansi kurang baik, karena rencana kerja yang dilakukan kurang maksimal.
- d. Kinerja instansi Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan baik. Akan tetapi, kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya mengaplikasikan *value for money*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini terdapat beberapa saran dari peneliti, yaitu:

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara

Diharapkan untuk mengurangi belanja semaksimal mungkin dan meningkatkan pendapatan. Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau defisit.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk melakukan penelitian di organisasi sektor publik lainnya terutama organisasi yang ada Sumatera Utara untuk mengetahui kinerja keuangannya. Sehingga organisasi sektor publik yang ada di Sumatera Utara menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78–85.
- Depdagri. (1997). *Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 : Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Didik. (2020). Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri) Tahun 2019. 151–156. *Skripsi*.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *EMBA*, 3(1), 2009–2013.
- Dinas Tenaga Kerja. (2018). *Laporan Kinerja Tahun 2018*. Dipetik 15 Maret, 2022, dari Dinas Tenaga Kerja: <https://disnaker.sumutprov.go.id/halaman/laporan>
- Dosen Pendidikan 2. (2022). *Akuntansi Sektor Publik: Tujuan, Karakteristik & Ruang Lingkup*. Dipetik 18 Maret, 2022, dari Dosen Pendidikan: dosenpendidikan.co.id/akuntansi-sektor-publik/
- Dua, A. (2021). *Kinerja Keuangan Perusahaan: Cara Analisis, Indikator, & Faktor*. Dipetik 8 Agustus, 2022, dari Rusdiono Consulting: rusdionoconsulting.com/kinerja-keuangan/
- Fardiaza, G. A. (2021). *Kinerja Keuangan: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Analisis, Penilaian Secara Lengkap*. Dipetik 8 Agustus, 2022, dari Daksanaya: <https://daksanaya.id/arc14jun21>
- Gie. (2020). *Pengertian Akuntansi Sektor Publik, Karakteristik, Tujuan, dan Ruang Lingkupnya*. Dipetik 2 Februari, 2022, dari Accurate: <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-akuntansi-sektor-publik/>
- Halim, A., & Syam Kusufi, M. (2013). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan, dkk. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Medan: Madenatera.
- Khoiriyah, L. S. (2020). Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. *Skripsi*.

- Kuncoro, Hanan. (2020). *Value for Money; Definisi, Manfaat, Indikator, dan Pengukuran*. Dipetik 2 Februari, 2022, dari Jojonomic: <https://www.jojonomic.com/blog/value-for-money/>
- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *EMBA*, 4(1), 1473-1484.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Katalogis*, 5(3), 190–200.
- Ratmono, Dwi. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Pengertian Menurut Ahli, Tujuan, Jenis*. Dipetik 17 Maret, 2022, dari Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/#:~:text=Menurut%20Dwi%20Ratmono%20pengertian%20akuntansi,yang%20bermanfaat%20bagi%20pihak%20eksternal>.
- Riadi, Muchlisin. (2020). *Value for Money (Pengertian, Manfaat, Indikator dan Pengukuran)*. Dipetik 2 Februari, 2022, dari Kajian Pustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/value-for-money.html>
- Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara (Cetakan Pertama)*. Medan: Umsu Press.
- Rusmidarti, & Yulitiawati. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU. 91–109.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 43–53.
- Sari, E. N. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 25–54.
- Sia, V. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran : Pengertian dan Cara Membuat*. Dipetik 9 Juni, 2022, dari Jurnal Entrepreneur: <https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-realisisasi-anggaran/>

- Sinambela, E., & Pohan, K. R. A. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Triyanto, D. (2017). Analisis Kinerja Organisasi dalam Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang). *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 6(4), 6–13.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 10(2).

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

Kodes Pemerintahan : 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Terwujud Kerja
 K Organisasi : 2.01.2.01.01 Divisi Tenaga Kerja
 s Unit Organisasi : 2.01.2.01.01.01 Divisi Tenaga Kerja

PERIODE	URATAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
	PENDAPATAN ✓	✓ 2.362.458.000,00	1.777.481.300,00	✓ 1.777.481.300,00	(584.976.700,00)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.362.458.000,00	1.777.481.300,00	1.777.481.300,00	(584.976.700,00)	
1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.362.458.000,00	1.777.481.300,00	1.777.481.300,00	(584.976.700,00)	
1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	57.882.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	(71.882.000,00)	
1.2.02.01	Retribusi Pemekar Kekayasaan Daerah	57.882.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	(71.882.000,00)	
1.2.03	Retribusi Penitman Terentu	2.274.576.000,00	1.761.481.300,00	1.761.481.300,00	(513.094.700,00)	
1.2.03.08	Retribusi Perpanjangan Izin Mengekerjakan TKA	2.274.576.000,00	1.761.481.300,00	1.761.481.300,00	(513.094.700,00)	
	BELANJA ✓	✓ 54.462.365.423,62	49.453.131.346,00	✓ 49.453.131.346,00	(5.009.234.077,62)	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	41.151.943.170,00	37.062.608.548,00	37.062.608.548,00	(4.009.134.622,00)	
1.1	Belanja Pegawai	41.151.943.170,00	37.062.608.548,00	37.062.608.548,00	(4.009.134.622,00)	
1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	17.358.676.663,00	14.507.872.721,00	14.507.872.721,00	(2.850.753.947,00)	
1.1.01.01	Gaji Pekerja PNS/Uang Representasi	13.498.386.124,00	11.222.691.290,00	11.222.691.290,00	(2.275.686.924,00)	
1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.317.487.128,00	1.091.646.346,00	1.091.646.346,00	(225.840.812,00)	
1.1.01.03	Tunjangan Jatah	488.029.260,00	406.030.000,00	406.030.000,00	(81.999.260,00)	
1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	470.000.000,00	404.970.200,00	404.970.200,00	(65.030.000,00)	
1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	366.576.839,00	283.750.000,00	283.750.000,00	(82.716.839,00)	
1.1.01.06	Tunjangan Beras	627.438.190,00	601.230.840,00	601.230.840,00	(26.200.150,00)	
1.1.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	61.292.171,00	19.929.665,00	19.929.665,00	(41.362.506,00)	
1.1.01.08	Pembentukan Gaji	300.000,00	169.920,00	169.920,00	(130.080,00)	
1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	4.791.167.000,00	369.741.974,00	369.741.974,00	(39.425.113,00)	
1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	30.000.000,00	26.926.120,00	26.926.120,00	(2.073.880,00)	
1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	90.000.000,00	80.778.656,00	80.778.656,00	(9.221.344,00)	
1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	21.793.316.507,00	22.554.735.827,00	22.554.735.827,00	(1.230.580.390,00)	
1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	23.793.316.507,00	22.554.735.827,00	22.554.735.827,00	(1.238.580.680,00)	
2	BELANJA LANGSUNG	13.310.422.233,62	12.390.522.796,00	12.390.522.793,19	(9.929.415,81)	
2.1	Belanja Pegawai	1.7.8.530.000,00	1.667.243.532,00	1.667.243.532,00	(101.205.468,00)	
2.1.04	Honorarium PNS	747.180.000,00	722.811.532,00	722.811.532,00	(24.361.468,00)	
2.1.01.01	Honorarium Panti Pelaksana Kepitikan	34.300.000,00	23.659.250,00	23.659.250,00	(10.641.750,00)	
2.1.01.02	Honorarium Tim Penyaduan Barang dan Jasa	51.020.000,00	39.640.000,00	39.640.000,00	(13.380.000,00)	
2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	659.860.000,00	659.512.782,00	659.512.782,00	(347.718,00)	
2.1.02	Honorarium Non PNS	1.021.350.000,00	944.432.000,00	944.432.000,00	(76.918.000,00)	
2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	295.300.000,00	278.992.000,00	278.992.000,00	(16.308.000,00)	
2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	603.810.000,00	544.690.000,00	544.690.000,00	(59.110.000,00)	
2.1.02.03	Honorarium Peserta Kegiatan	127.250.000,00	120.750.000,00	120.750.000,00	(1.500.000,00)	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.705.319.178,62	9.839.046.536,00	9.829.046.536,00	(817.302.592,62)	
2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	577.296.852,00	562.093.399,00	562.093.399,00	(15.203.453,00)	
2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	404.103.152,00	390.173.849,01	390.173.849,01	(13.929.203,00)	
2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.791.870,00	4.530.050,00	4.530.050,00	(1.261.750,00)	
2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, battery Kering)	49.999.000,00	49.999.000,00	49.999.000,00	0,00	
2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material dan Benda Pos Lainnya	14.994.000,00	14.594.000,00	14.594.000,00	0,00	
2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	102.405.900,00	102.396.500,00	102.396.500,00	(9.403,00)	
2.2.02	Belanja Bahan/Materi	133.621.366,00	128.149.800,00	128.149.800,00	(5.471.566,00)	
2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	76.599.366,00	71.124.800,00	71.124.800,00	(5.474.566,00)	
2.2.02.08	Belanja Perlengkapan Tempat Tidur/Perlengkapan Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.02.10	Belanja Bahan Olahraga	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
2.2.02.11	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.02.14	Belanja Hadiah/Tropy/Souvenir	37.525.000,00	37.525.000,00	37.525.000,00	0,00	
2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.648.095.500,00	1.443.918.491,00	1.443.918.491,00	(204.277.009,00)	
2.2.03.01	Belanja Telepon	15.000.000,00	4.991.040,00	4.991.040,00	(10.008.952,00)	
2.2.03.02	Belanja Air	90.000.000,00	59.570.340,00	59.570.340,00	(30.429.660,00)	
2.2.03.03	Belanja Listrik	475.000.000,00	469.296.669,00	469.296.669,00	(5.703.331,00)	
2.2.03.04	Belanja Jasa Media Elektronik	6.402.000,00	0,00	0,00	(6.402.000,00)	
2.2.03.05	Belanja Jasa Media Cetak	49.625.000,00	49.442.000,00	49.442.000,00	(18.603,00)	

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
 Unit Organisasi : 2.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja
 Sub Unit Organisasi : 2.01.2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			4/3 PERIODE LALU	PERIODE INI	LEBTAH (KURANG)
4	PENDAPATAN ✓	✓ 1503.000.000,00	2.006.757.700,00	✓ 2.006.757.700,00	101.757.700,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1503.000.000,00	2.006.757.700,00	2.006.757.700,00	50.757.700,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.503.000.000,00	2.006.757.700,00	2.006.757.700,00	50.757.700,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
4.1.2.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000.000,00	2.000.757.700,00	2.000.757.700,00	50.757.700,00
4.1.2.08	Retribusi Perpanjangan Izin Mempelajarkan TKA	1500.000.000,00	2.000.757.700,00	2.000.757.700,00	50.757.700,00
5	BELANJA ✓	✓ 44.102.158.873,40	41.893.612.917,00	✓ 41.893.612.917,00	(2.209.241.961,40)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.195.100.200,00	32.576.627.309,00	32.576.627.309,00	(1.618.472.891,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	34.195.100.200,00	32.576.627.309,00	32.576.627.309,00	(1.618.472.891,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.693.100.000,00	15.056.494.211,00	15.056.494.211,00	(50.402.399,00)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Represensasi	12.175.011.200,00	12.024.652.659,00	12.024.652.659,00	(120.352.532,00)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.151.352.000,00	1.136.736.126,00	1.136.736.126,00	(15.615.874,00)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	432.479.000,00	490.470.000,00	490.470.000,00	(7.000.000,00)
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	475.723.000,00	472.700.000,00	472.700.000,00	(3.023.000,00)
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	273.284.000,00	170.123.000,00	170.123.000,00	(3.259.000,00)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	533.457.000,00	529.172.940,00	529.172.940,00	(4.286.060,00)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPN/Tunjangan Khusus	70.000.000,00	47.920.794,00	47.920.794,00	(22.079.206,00)
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	300.000,00	149.208,00	149.208,00	(150.791,00)
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.449.319.000,00	982.829.988,00	972.739.499,00	(463.519.512,00)
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kezelakaan Kerja (JKK)	1.000.000,00	24.556.070,00	24.556.070,00	(3.453.970,00)
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	87.000.000,00	73.633.017,00	73.633.017,00	(13.363.983,00)
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	17.500.000.000,00	16.520.132.998,00	16.520.132.998,00	(97.867.002,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	17.500.000.000,00	16.520.132.998,00	16.520.132.998,00	(97.867.002,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	9.905.658.673,00	9.317.285.600,00	9.317.285.600,00	(58.373.073,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	1.812.593.304,00	1.777.781.500,00	1.777.781.500,00	(34.811.804,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS	799.333.304,00	762.721.500,00	762.721.500,00	(36.571.804,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panti Pelayanan Kependidikan	50.402.000,00	48.199.500,00	48.199.500,00	(2.202.500,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Bantuan dan Jasa	17.180.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00	(5.122.000,00)
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	41.880.000,00	42.350.000,00	42.350.000,00	(2.230.000,00)
5.2.1.01.04	Honorarium Tim Penerima Hasil Penkerjaan	6.480.000,00	620.000,00	620.000,00	(5.850.000,00)
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	578.160.000,00	577.500.000,00	577.500.000,00	(480.000,00)
5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	102.293.304,00	102.292.000,00	102.292.000,00	(1.304,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.013.200.000,00	995.060.000,00	995.060.000,00	(18.140.000,00)
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Taresumber	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	995.200.000,00	977.760.000,00	977.760.000,00	(18.140.000,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Peseerta Mengikuti Kegiatan	19.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.941.110.221,00	6.446.717.002,00	6.446.717.002,00	(494.393.219,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakaian	354.966.235,00	30.850.135,00	30.850.135,00	(324.116.100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.704.715,00	217.197.705,00	217.197.705,00	(23.707.010,00)
5.2.2.01.04	Belanja Perangkat Matrial Dan Benda Pcs Lainnya	42.000.000,00	41.546.000,00	41.546.000,00	(440.000,00)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.601.390,00	40.200.457,00	40.200.457,00	(390.933,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.470.570,00	64.470.570,00	64.470.570,00	0,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	19.485.000,00	19.485.000,00	19.485.000,00	0,00
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Logistik-Rumah Tangga	44.993.170,00	44.993.570,00	44.993.570,00	2.00
5.2.2.02.15	Belanja Bahan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kartu	1.693.202.500,00	1.479.222.539,00	1.479.222.539,00	(214.973.961,00)
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.000.000,00	4.990.384,00	4.990.384,00	(10.616,00)
5.2.2.03.02	Belanja Air	91.170.000,00	37.080.148,00	37.080.148,00	(54.091.852,00)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	723.790.000,00	607.122.837,00	607.122.837,00	(115.712.163,00)
5.2.2.03.04	Belanja Jasa M. & Ia Elektronik	17.124.000,00	7.811.446,00	7.811.446,00	(9.312.554,00)
5.2.2.03.05	Belanja Jasa M. & Ia Cetak	30.500.000,00	38.065.500,00	38.065.500,00	(37.565.000,00)
5.2.2.03.06	Belanja Jasa Pengiriman	62.931.000,00	46.982.240,00	46.982.240,00	(15.948.760,00)
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak/kendaraan dan motor	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pemeliharaan Kehidupan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Keterlaluan/Cuci dan Sabun	1.000.000,00	631.320.763,00	631.320.763,00	(5.319.747,00)
5.2.2.03.18	Belanja Kewaspadaan/Fakta/Internet/Intranet/VIN-IP, TV, Kabel/TV Satelit	107.479.500,00	84.816.550,00	84.816.550,00	(22.663.950,00)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	299.400.450,00	299.603.375,00	299.603.375,00	(8.201.925,00)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	97.109.950,00	91.157.875,00	91.157.875,00	(6.031.075,00)
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	202.210.500,00	199.445.500,00	199.445.500,00	(2.765.000,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.495.100,00	286.024.238,00	286.024.238,00	(10.471.862,00)
5.2.2.06.01	Belanja cetak	180.522.050,00	177.765.589,00	177.765.589,00	(2.756.461,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.626.250,00	99.969.650,00	99.969.650,00	(7.656.600,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penyidikan	9.326.800,00	9.326.800,00	9.326.800,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	182.040.000,00	176.040.000,00	176.040.000,00	(6.000.000,00)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
4	PENDAPATAN DAERAH ✓	✓ 1.910.000.000,00	0,00	✓ 1.759.598.740,00	1.759.598.740,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.910.000.000,00	0,00	1.759.598.740,00	1.759.598.740,00
4.1.2	Retribusi Daerah	1.910.000.000,00	0,00	1.759.598.740,00	1.759.598.740,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
4.1.2.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.900.000.000,00	0,00	1.759.198.740,00	1.759.198.740,00
4.1.2.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.900.000.000,00	0,00	1.759.198.740,00	1.759.198.740,00
4.1.2.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.900.000.000,00	0,00	1.759.198.740,00	1.759.198.740,00
5	BELANJA DAERAH ✓	✓ 50.200.740.052,00	0,00	✓ 47.022.066.385,16	47.022.066.385,16
5.1	BELANJA OPERASI	48.208.639.553,00	0,00	45.222.751.585,16	45.222.751.585,16
5.1.1	Belanja Pegawai	32.892.902.810,00	0,00	30.933.203.038,00	30.933.203.038,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	16.515.842.810,00	0,00	15.127.636.428,00	15.127.636.428,00
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	11.957.849.810,00	0,00	11.165.500.722,00	11.165.500.722,00
5.1.1.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	11.857.849.810,00	0,00	11.165.500.722,00	11.165.500.722,00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.134.623.000,00	0,00	1.052.646.611,00	1.052.646.611,00
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.134.623.000,00	0,00	1.052.646.611,00	1.052.646.611,00
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	604.227.000,00	0,00	547.321.150,00	547.321.150,00
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	604.227.000,00	0,00	547.321.150,00	547.321.150,00
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	485.143.000,00	0,00	472.510.000,00	472.510.000,00
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	485.143.000,00	0,00	472.510.000,00	472.510.000,00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	268.250.000,00	0,00	249.935.000,00	249.935.000,00
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	268.250.000,00	0,00	249.935.000,00	249.935.000,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	594.214.000,00	0,00	561.544.530,00	561.544.530,00
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	594.214.000,00	0,00	561.544.530,00	561.544.530,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 6

eink4 B4 S4-08



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
17 Maret 2022 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : A Y U F I T R I A

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 2 6 2

Tempat.Tgl. Lahir : Medan, 31 Januari
2000

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : Jl. Santun Nog 7 Medan
Kota, kel. Sudirejo 01

Tempat Penelitian : Dinas Tenaga Kerja
dan Teknologi Provinsi

Alamat Penelitian : Jl. Asrama No 143 Dwi
Kota Medan Helvetia,
Kota Medan

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Dr. Zulia Hanum ST, M.Si.)

Wassalam
Pemohon

(Ayu Fitria)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2320/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/9/2021

Kepada Yth.

Medan, 28/9/2021

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ayu Fitria
NPM : 1705170262

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Untuk Mengetahui Bagaimana Kinerja Dinas Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara

Rencana Judul : 1. Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value For Money pada Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER).
2. Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Pendekatan Value For Money pada Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER).
3. Peran Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

Objek/Lokasi Penelitian : Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


 (Ayu Fitria)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2320/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/9/2021

Nama Mahasiswa	:	AyuFitria
NPM	:	1705170262
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul	:	28/9/2021
Nama Dosen pembimbing*	:	Ummi Kalsum, SE., M.Si (19 Oktober 2021)

Judul Disetujui** : Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Pendekatan Value For Money pada Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER).

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Mulia Hanum, SE, M.Si.

Medan, 6 Desember 2021
 Dosen Pembimbing

(Ummi Kalsum SE., M.Si)

Keterangan:
 *) Disi oleh Pimpinan Program Studi
 **) Disi oleh Dosen Pembimbing
 Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menyalah surat ini agar di sebutkan
namor dan tanggallnya

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 618/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 06 Desember 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama	:	Ayu Fitria
N P M	:	1705170262
Semester	:	X (Sepuluh)
Program Studi	:	Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi	:	Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : **Umi Kalsum, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar
Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa
Daluarsa tanggal : 17 Maret 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Sva'ban 1442 H
17 Maret 2022 M


 Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : AYU FITRIA
 NPM : 1705170262
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 Nama Dosen Pembimbing : UMI KALSUM, SE., M.Si
 Judul Proposal : ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
 DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS
 TENAGA KERJA DAN TEKNOLOGI PROVINSI
 SUMATERA UTARA

Item	Hasil valuasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	<ul style="list-style-type: none"> - Cover di perbaiki lihat lagi pedoman penyusunan skripsi. - latar belakang jelaskan apa yang menjadi fenomena dalam penelitian kamu, rumusan masalah, dan perbaiki penulisan 	7/02/2022	
Bab 2	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan teori yang mendukung dalam penelitian ini . - cari penelitian terdahulu minimal 5 sebagai perbandian untuk penelitian ini , perbaiki lagi kerangka konseptuanya 	08/03/2022	
Bab 3	<ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan metode penelitian yang kamu gunakan , tabel kemajuan di perbaiki 	4/04/2022	
Daftar Pustaka	<p>Daftar pustaka wajib menggunakan mendele</p> <p>Semua yg di kutip di dalam penulisan skripsi wajib di masukan di daftar pustaka</p>	4/04/2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lengkap lampiran ya	10/04/2022	



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

Persetujuan Seminar Proposal	<i>ACC Seminar Proposal</i>	12/04/2022	
---------------------------------	-----------------------------	------------	---

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si

Medan, April 2022

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

UMI KALSUM, SE., M.Si



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 02 Juni 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ayu Fitria*
 NPM. : 1705170262
 Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 31 Januari 2000
 Alamat Rumah : Jl. SM Raja/Jl. Santun No.67 Medan
 Judul Proposal : Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money Pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara
 Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
Bab I	<i>latih. belakang masalah latih. definisi organisasi publik identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>temi disesuaikan kerangka teor. sepihak</i>
Bab III
Lainnya	<i>disertakan penulisan sesum buku pedoman bantuan. pustaka, dimasukan jurnal. Desn. Akd. UMMU</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 02 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Umi Kalsum, SE., M.Si

Pembanting

Elizar Sinambela, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 02 Juni 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Ayu Fitria
 NPM : 1705170262
 Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 31 Januari 2000
 Alamat Rumah : Jl. SM Raja/Jl. Santun No.67 Medan
 Judul Proposal : Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money Pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 02 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pembimbing

Umi Kalsum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembanding

Elizar Sinambela, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE M.Si
 NIDN : 0105087601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Siliz menjawab surat ini agar di sebutkan
nomor dan tanggallnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 620/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 14 Sya'ban 1442 H
17 Maret 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan

Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara
Jln. Asrama No.143 Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, 20126
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesedian Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-I)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ayu Fitria
Npm : 1705170262
Program Studi : Akuntansi
Semester : X (Sepuluh)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Asrama No. 143 Medan Telp:(061)8452261 – 8452551

Website : www.disnaker.sumutprov.go.id; Email : disnaker@sumutprov.go.id

Medan – 20126 disnaker@sumutprov.go.id

Medan – 20126

Nomor : 071/365 -1/DTK/III/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset

Medan, 24 Maret 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera
 Utara
 di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 620/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Izin Riset Pendahuluan, dengan ini disampaikan bahwa untuk melakukan Riset pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara terhadap mahasiswa, yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Ayu Fitria
 NPM : 1705170262
 Program Studi : Akuntansi

2. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan riset pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara guna bahan penulisan Skripsi dengan judul "**Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara**".
3. Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 Ub. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa diunggah tanpa batasan ukuran
nomor dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

Nomor : 2029/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
 Lamp. : -
 Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 16 Dzulhijjah 1443 H
 15 Juli 2022 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara
 Jln. Asrama No. 143 Dwi Kora, Medan Helvetia, Medan.
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ayu Fitria
 N P M : 1705170262
 Semester : X (Eks)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money Pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS TENAGA KERJA

Jln. Asrama No. 143 Telp. 8552551 – 8452261

Website: www.disnaker.sumutprov.go.id ; Email: disnaker@sumutprov.go.id

Medan - 20126

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/ 950 -1/DTK/VII/2022

Sehubungan dengan surat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 071/365-1/DTK/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Izin Riset, maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ayu Fitria
 NPM : 1705170262
 Program Studi : Akuntansi

Benar telah melaksanakan Riset/Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, guna bahan penulisan Skripsi dengan judul ***“Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara”***.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan : Medan
Pada Tanggal : 20 Juli 2022

An. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 Ub. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Ayu Fitria
 NPM : 1705170262
 Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 31 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Santun No. 67 Kec. Medan Kota, Medan.
 No. Telepon : 081360762644
 Email : ayudevi.fitria@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Erinaldi
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nama Ibu : Yusna Devi
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl. Santun No. 67 Kec. Medan Kota, Medan.

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah 10
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Swasta Al-Ulum
 Sekolah Menengah Atas : SMA Swasta Al-Ulum
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Juli 2022



Ayu Fitria